

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN KOTA BATAM SEBAGAI DAERAH TUJUAN PARIWISATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

NPM: 17125201
LISBET PURBA

ABSTRAK

Kota Batam memiliki beragam jenis wisata yang merupakan daya tarik dalam menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Kota Batam. Kota Batam menduduki peringkat ketiga dalam destinasi Pariwisata Nasional setelah Bali dan Jakarta. Hal ini disebabkan letak Kota Batam yang sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Thailand.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan Kota Batam sebagai daerah tujuan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Kota Batam sebagai daerah tujuan pariwisata.

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris, teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Batam bisa menjadi daerah tujuan pariwisata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, namun pemerintah Kota Batam harus segera membuat peraturan daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Batam (Perda RIPPD) dan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) supaya industri pariwisata di Batam dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Kata kunci: Pariwisata, Daerah Tujuan Pariwisata, Undang-Undang Kepariwisataaan.